

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Konteks Penelitian**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dinas ini juga bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan teknis, melakukan pembinaan, serta menjalankan operasional yang berkaitan dengan kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Dalam pelaksanaannya, pengembangan ekonomi kreatif dijalankan langsung oleh Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Peran dan fungsi tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Di era transformasi digital saat ini, organisasi pemerintahan daerah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui implementasi inovasi layanan berbasis teknologi informasi. Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang telah mengimplementasikan konsep pemerintahan digital melalui Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan suatu bentuk transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, serta menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi.

Pada tingkat nasional, implementasi SPBE diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,

yang menjadi landasan strategis bagi pengembangan tata kelola pemerintahan modern berbasis digital. Selaras dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Bandung turut mengadopsinya melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) Bandung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pemerintahan digital yang terstruktur dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam setiap aspek pelayanan publik.

Sebagai bentuk Implementasi dari kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Bandung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata meluncurkan Platform Patrakomala. Platform ini bertujuan untuk mendukung pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi informasi, serta partisipasi masyarakat dalam bidang kebudayaan dan pariwisata. Platform Patrakomala diresmikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung pada tanggal 21 April 2021 oleh Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, yang mana berperan sebagai instrumen layanan administrasi publik guna mendukung optimalisasi penataan serta pengembangan sektor ekonomi kreatif.

Lebih lanjut, komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif juga tercermin dalam regulasi yang telah diterbitkan, dan diperkuat dengan adanya Peraturan Walikota Bandung No. 132 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi

Ekonomi Kreatif Kota Bandung. Melalui regulasi ini, Pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, berupaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif dengan menerapkan inovasi berbasis digital, sehingga sektor ini dapat berkembang secara optimal dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan digitalisasi ke dalam ekosistem ekonomi kreatif yang bertujuan untuk mengoptimalkan daya kreasi para pelaku usaha melalui ekosistem digital yang memungkinkan akses luas bagi masyarakat dalam memanfaatkan platform kreatif berbasis teknologi.

Platform Patrakomala didalamnya menghimpun informasi dan data dari seluruh pelaku ekonomi kreatif di tujuh belas subsektor ekonomi kreatif Kota Bandung, diantaranya, musik; fotografi; film, animasi, dan video; tv dan radio; desain produk; kriya; penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni rupa; aplikasi; pengembangan permainan; desain grafis; desain interior; kuliner; arsitektur; dan fesyen. Kemudian memetakannya menjadi pusat informasi yang mudah diakses bagi segala pihak yang terlibat, baik investor, pemangku kepentingan, maupun khalayak umum serta menyajikan berita-berita terkini seputar kegiatan dan seluk beluk ekonomi kreatif di Kota Bandung (Website Patrakomala).

Platform Patrakomala dapat diakses melalui situs web [patrakomala.disbudpar.bandung.go.id](http://patrakomala.disbudpar.bandung.go.id). yang mana berperan sebagai media informasi yang menyajikan perkembangan terkini serta berbagai dinamika dalam ekosistem industri kreatif di Kota Bandung. Didalamnya terdapat 4667 para pelaku

Ekonomi Kreatif (Website Patrakomala). Implementasi Platform Patrakomala diwujudkan melalui berbagai program strategis, diantaranya Patrakomala *Creative Center* (PCC), program inkubasi, pameran, sosialisasi, serta peningkatan keterampilan dan kompetensi. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dengan menyediakan ruang bagi para pelaku industri kreatif untuk berinovasi, membangun jejaring, serta mengembangkan kapasitas mereka secara profesional. Melalui serangkaian program tersebut, Patrakomala tidak hanya berfungsi sebagai platform pengembangan kreativitas, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan inklusif. Serta tersedia sejumlah layanan terintegrasi yang bertujuan untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro/kecil, komunitas kreatif, dan masyarakat umum. Salah satu layanan utama yang ditawarkan adalah pendaftaran HKI secara digital, yang disebut SAFARI HKI dimana pelaku ekonomi kreatif dapat mengakses proses registrasi hak cipta, merek atau paten melalui sistem online.

SAFARI HKI Ekonomi Kreatif adalah inisiatif konkret Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Bidang Ekonomi Kreatif dalam meningkatkan kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di kalangan pelaku ekonomi kreatif. Program ini bertujuan untuk mengatasi rendahnya tingkat pendaftaran HKI dengan mengalihkan layanan dari sistem manual ke platform digital yang lebih efisien dan mudah diakses, ini merupakan bagian dari optimalisasi pelayanan publik dalam pemenuhan hak masyarakat terhadap layanan administratif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagai langkah inovatif dalam mempercepat proses pelayanan,

Hadirnya Platform Patrakomala ini sebagai instrumen digital dalam mendukung penataan dan pengembangan ekonomi kreatif, sekaligus meningkatkan transparansi serta efektivitas layanan publik di sektor tersebut. Platform ini memfasilitasi sinergi antara pelaku industri kreatif untuk menciptakan produk bernilai tambah. Pelaku usaha dapat mendaftarkan bisnisnya secara resmi melalui platform ini, sekaligus memanfaatkan ruang promosi untuk meningkatkan visibilitas produk lokal.

Akses terhadap Platform Patrakomala dapat dilakukan melalui kanal resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, termasuk akun Instagram @disbudpar.bdg dan @patrakomala.bandung. Meskipun sebagian layanan memerlukan registrasi atau proses kurasi, platform ini secara umum bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang inklusif, transparan dan berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi kreatif serta pelestarian budaya di Kota Bandung. Ini menjadikan, Platform Patrakomala bukan sekedar sarana administratif, tetapi juga wahana strategis dalam membangun kesadaran hukum, inovasi, dan daya saing masyarakat di era digital. Semua ini dirancang sebagai jembatan strategis yang menghubungkan para pelaku ekonomi kreatif dengan ekosistem pasar yang memiliki antusiasme tinggi terhadap industri kreatif di Kota Bandung serta berfungsi sebagai sarana penghubung antara pelaku usaha kreatif dengan investor serta pemangku kepentingan di sektor industri kreatif, sehingga membuka peluang kolaborasi dan pengembangan bisnis yang lebih luas.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai representasi pemerintah, berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, komunitas masyarakat, sektor swasta serta media, Kolaborasi ini

bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program kerja yang telah dirancang, sehingga dapat berjalan secara lebih efektif dan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat (Maulana et al.,2024). Kolaborasi ini sangat penting dalam konteks Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui Platform Patrakomala, karena melibatkan berbagai perspektif dan sumber daya yang dapat memperkuat efektivitas kebijakan tersebut. Dengan dukungan dari akademisi, Dinas dapat memanfaatkan penelitian dan analisis yang mendalam untuk merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, keterlibatan komunitas masyarakat akan memastikan bahwa program yang dijalankan relevan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat lokal. Badan swasta dapat berkontribusi melalui inovasi dan investasi, sedangkan media berperan dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran publik tentang layanan yang tersedia. Sinergi antara semua pihak ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung keberhasilan implementasi Platform Patrakomala.

Namun, meskipun telah mengimplementasikan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui Platform Patrakomala, masih terdapat tantangan dan hambatan yang dihadapi. Hal ini ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Tassya et al., 2025 ), mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi sebelum memulai kolaborasi dalam program Patrakomala, dari perspektif teknis, bahwa terdapat hambatan dalam aspek kepercayaan dan kejelasan peran masing-masing pihak. Pemerintah, komunitas, dan swasta belum sepenuhnya memahami tanggung jawab masing-masing, sehingga kolaborasi berjalan tidak efektif. Dari segi teknis, tantangan utama terletak pada kesenjangan kapasitas,

sulitnya koordinasi antar pihak. Di sisi sosial, perbedaan visi, tingkat komitmen yang tidak merata, dan resistansi dari komunitas lokal menjadi faktor yang menghambat sinergi. Temuan ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang dan pengelolaan kolaborasi yang baik sebagai dasar keberhasilan program berbasis kolaboratif.

Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman pejabat dalam mengatasi hambatan dan adanya indikasi masalah dalam sisi komunikasi kebijakan telah menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan baik kepada seluruh pemangku kepentingan. Akibatnya, efektivitas Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui Platform Patrakomala belum optimal. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Achdiat et al., 2023) mengungkapkan bahwa tidak semua pelaku ekonomi kreatif mengikuti inovasi yang diberikan pemerintah, sehingga inovasi kebijakan yang telah diterapkan tidak termanfaatkan secara maksimal. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah minimnya sosialisasi serta kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat yang dapat diperoleh dari platform tersebut.

Kemudian permasalahan juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan (Ajri 2024), yang mana diungkap bahwasanya jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kota Bandung yang memiliki sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih tergolong rendah, meskipun layanan SAFARI HKI telah disediakan melalui Platform Patrakomala. Rendahnya tingkat kepemilikan HKI ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya sosialisasi yang menyeluruh kepada pelaku ekonomi kreatif mengenai pentingnya perlindungan HKI, serta prosedur pengajuan

yang dinilai rumit dan memakan waktu. Selain itu, sistem layanan yang tersedia belum dilengkapi dengan fitur penyaringan data otomatis dan belum terintegrasi secara optimal, sehingga memperlambat proses verifikasi dan pelayanan. Dibutuhkan peningkatan kualitas layanan, serta intensifikasi sosialisasi agar perlindungan kekayaan intelektual dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku industri kreatif di Kota Bandung.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui Platform Patrakomala dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat keberhasilan Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Melalui Platform Patrakomala oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Maka dari itu peneliti tertarik untuk dilakukannya penelitian secara komprehensif yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui Platform Patrakomala oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung”**

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berlandaskan pemaparan pada latar belakang diatas, maka dari itu Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan SPBE melalui Platform Patrakomala oleh Disbudpar Kota Bandung secara efektif, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya guna memberikan evaluasi dan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Sebagaimana latar belakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan melalui pemanfaatan studi literatur dan observasi, maka peneliti merumuskan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Melalui Platform Patrakomala oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung?
2. Apa Saja faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Melalui Platform Patrakomala oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Permasalahan yang telah dirumuskan pada pembahasan sebelumnya. Maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan secara efektif Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui Platform Patrakomala di Kota Bandung.
2. Untuk memahami faktor pendukung dan penghambat untuk evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui Platform Patrakomala di Kota Bandung.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Dengan harapan penelitian ini mampu berguna bagi pihak yang memerlukan informasi terkait penelitian ini, berikut adalah :

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Peneliti berharap Penelitian ini dapat dijadikan bahan Kajian Studi ilmu pengetahuan mengenai penerapan Administrasi Publik, serta mampu memberikan pemahaman yang positif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai referensi strategis serta wawasan akademis yang bermanfaat bagi berbagai lembaga dan instansi guna mendorong perkembangan yang berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai instrumen dalam mengidentifikasi tantangan serta merumuskan solusi terkait pengembangan ekonomi kreatif melalui Platform Patrakomala oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Dengan demikian, optimalisasi fungsi dan tugas institusi dapat diwujudkan secara lebih efektif, efisien.